

Research Article

The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital

Ahmad Ghazy Dananjaya

Institut Teknologi Bandung

E-mail: ahmadghazydananjaya@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : February 28, 2026

Revised : March 25, 2026

Accepted : April 18, 2026

Available online : April 30, 2026

How to Cite: Ahmad Ghazy Dananjaya. (2026). The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital. *Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam*, 2(3), 125–133. <https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v2i3.42>

Abstract

This research aims to explore the tension between technocratic state legal norms and customary norms (local wisdom) in the process of recognizing the living spaces of indigenous communities in the Nusantara Capital City (IKN). Through the lens of group dynamics and legal pluralism, this study dissects how administrative verification mechanisms often fail to capture the sociological existence of unwritten customary law. Utilizing a qualitative single case study approach, data were collected through in-depth interviews with 122 Multiple Helix informants and legal documentation studies. The research findings reveal the phenomenon of "administrative violence," where the requirement for proof of customary land (ulayat) in the form of digital maps and formal documents becomes an existential barrier for local communities. Although IKN has successfully instilled modern disciplinary norms, there is a massive gap in embracing authentic socio-cultural legitimacy. The research recommends the relaxation of customary evidentiary requirements based on oral testimony and anthropological evidence to realize a just "City for All" vision.

Keywords: Customary Norms, Local Wisdom, Administrative Violence, Spatial Justice, Multiple Helix.

Benturan Norma Legal-Formal dan Local Wisdom Terkait Tantangan Pengakuan Ruang Hidup Suku Lokal di Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketegangan antara norma hukum negara yang bersifat teknokratis dengan norma adat (local wisdom) dalam proses pengakuan ruang hidup masyarakat asli di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui lensa dinamika kelompok dan pluralisme hukum, studi ini membedah bagaimana mekanisme verifikasi administratif sering kali gagal menangkap eksistensi sosiologis hukum adat tak tertulis.

The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital

Ahmad Ghazy Dananjaya

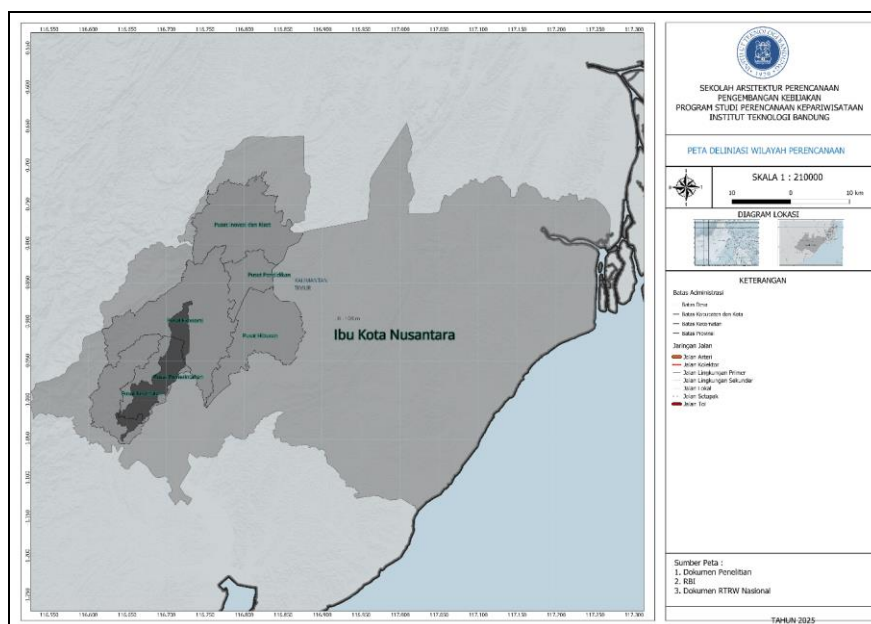
Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 122 informan Multiple Helix dan studi dokumentasi hukum. Hasil penelitian menyingkap adanya fenomena "kekerasan administratif" (administrative violence), di mana syarat pembuktian ulayat berupa peta digital dan dokumen formal menjadi hambatan eksistensial bagi komunitas lokal. Meskipun IKN berhasil menanamkan norma kedisiplinan modern, terdapat kesenjangan besar dalam merangkul legitimasi sosiokultural asli. Penelitian merekomendasikan relaksasi syarat pembuktian adat berbasis kesaksian lisan dan bukti antropologis guna mewujudkan visi "Kota untuk Semua" yang berkeadilan.

Kata Kunci: Norma Adat, Local Wisdom, Kekerasan Administratif, Keadilan Ruang, Multiple Helix.

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota merupakan instrumen pembangunan transformatif (Ghalib dkk., 2021) yang merepresentasikan kekuatan politik nasional di panggung global (Al-Hagla, 2025). Branding IKN dicitrakan melalui simbol "Pohon Hayat" sebagai representasi "Keagungan Baru" (Hudalah, 2026) guna mendorong pemerataan investasi ke wilayah timur (Siti dkk., 2023). Namun, membangun identitas merek di lahan *greenfield* memerlukan legitimasi publik yang kuat (Afrilia dkk., 2025) serta lanskap perkotaan berkualitas (Al-Hagla, 2025) yang didukung oleh penetapan lokasi strategis (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2024). Visi ini menuntut sinkronisasi antara narasi besar negara dengan persepsi masyarakat agar tidak terjadi inersia dalam proses pembangunannya.

Secara administratif, wilayah IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Wicaksono dkk., 2024; Suprayitno dkk., 2024). Wilayah ini dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan kewenangan *lex specialis* guna memastikan birokrasi yang lincah (Ahmadi dan Muhjad, 2024; Haq dan Suhartono, 2024). Namun, status daerah otorita ini menimbulkan perdebatan mengenai koherensi status daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia (Addas, 2024).



Gambar 1. 1 Peta Delineasi Wilayah Ibu Kota Nusantara
Sumber: Dokumen Penelitian (2026)

The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital

Ahmad Ghazy Dananjaya

Ketegangan muncul ketika norma pembangunan yang kaku berhadapan dengan eksistensi masyarakat asli Suku Paser dan Balik (Umasangaji dkk., 2023). Realisasi konsep "Smart Forest City" menuntut kolaborasi stakeholder yang kompleks (Sabrina dkk., 2024) di tengah tantangan asimetri kekuasaan yang didominasi pemerintah pusat (Ansell, 2008). Seringkali, suara komunitas lokal terabaikan dalam pengambilan keputusan desain yang bersifat teknokratis (Hudalah, 2023). Dinamika kolaborasi diperumit oleh proses legislasi yang cepat sehingga membatasi musyawarah deliberatif dengan warga asli (Althalets dkk., 2025; Fitria dan Rochim, 2025).

Dalam dimensi sosial, terdapat disparitas antara narasi digital "Kota Dunia" dengan realitas fisik masyarakat di ring penyangga (Purba dkk., 2023). Ekuitas merek destinasi bergantung pada persepsi kualitas (Shah dkk., 2020), namun pembangunan masif berisiko memarjinalkan identitas lokal (Umasangaji, 2022) dan memicu konflik lahan ulayat (Afifuddin dkk., 2022; Basalamah dan Handayani, 2025). Norma pembangunan berkelanjutan wajib mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) guna melindungi perlindungan habitat dan budaya asli (Atmoko dkk., 2024).

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Mengapa mekanisme verifikasi administratif yang teknokratis gagal mengakomodasi eksistensi sosiologis hukum adat tak tertulis di IKN? Fokus utama adalah membedah benturan antara norma legal-formal yang dibawa pemerintah dengan norma informal yang dipegang teguh oleh Suku Paser dan Balik. Hal ini krusial karena ketidakhadiran pengakuan negara dapat memicu trauma budaya dan disintegrasi sosial di wilayah pembangunan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kritik legal-sosiologis terhadap formalisme pengakuan adat di wilayah *lex specialis*. Berbeda dengan studi terdahulu yang fokus pada dampak banjir (Handyastono dkk., 2025) atau infrastruktur jalan (Saleh dkk., 2025), penelitian ini mengintegrasikan teori dinamika kelompok dan *place branding* untuk membedah dimensi kekuasaan dalam perumusan norma identitas kota (Cancela-Outeda, 2024). Studi ini mengisi celah literatur mengenai bagaimana beban administratif ulayat menciptakan "jarak kenyataan" (*reality gap*) bagi masyarakat asli di tengah kemegahan proyek nasional (Prasanti dkk., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berpijak pada paradigma interpretivisme yang memandang kenyataan sebagai konstruksi subjektif dan kompleks (Decrop, 1999). Desain penelitian menggunakan studi kasus tunggal yang bersifat eksploratif dan instrumental guna membedah keunikan fenomena pembangunan IKN (Yin, 2018). Mengingat interaksi aktor terjadi di ruang yang beragam, penelitian mengadopsi pendekatan *multi-sited* mencakup lokasi fisik di Jakarta dan tapak IKN Kalimantan Timur, serta lokasi virtual melalui ruang digital (Hilal dan Alabri, 2013).

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* terhadap 122 informan dari elemen *Multiple Helix*—Pemerintah, Bisnis, Komunitas (Tokoh Adat), Akademisi, Media, dan Wisatawan (Nascimento dkk., 2016). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam hibrida dan observasi netnografi di platform X dan YouTube (Azeem dkk., 2012; Bayu, 2025). Data primer tersebut kemudian diolah menggunakan perangkat lunak NVivo untuk melakukan *Thematic Coding* dan *Sentiment Analysis* guna menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan (Lincoln dan Guba, 1985; Miles dkk., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma dan Keadilan Ruang

Norma dipahami secara mendalam bukan sekadar sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai aturan tak tertulis yang mengikat perilaku anggota kelompok dan menentukan tingkat solidaritas internal (Benedict, 1934). Dalam perspektif sosiologi, norma merupakan hasil dari interaksi timbal balik (*interdependence*) antara individu dengan lingkungan sosialnya yang menciptakan perubahan sistemik secara terus-menerus (Lewin, 1947). Dinamika norma kelompok memegang peranan vital dalam menentukan pembagian peran, status hierarkis, dan tekanan konformitas di antara aktor yang berkolaborasi (Cartwright dan Zander, 1968).

Dalam kerangka tata kelola, kolaborasi yang efektif menuntut adanya norma kesetaraan dan pembangunan kepercayaan melalui dialog tatap muka (Ansell dan Gash, 2008). Namun, dalam pembangunan IKN, muncul fenomena *Mandated Collaboration* di mana aturan formal negara cenderung mendikte perilaku aktor non-negara (Afandi dkk., 2023). Hal ini selaras dengan konsep pluralisme hukum, di mana terdapat persaingan antara legalitas hukum negara yang kaku dengan hak ulayat adat yang seringkali diabaikan atas nama kedaruratan pembangunan (Umasangaji dkk., 2023; Nurish, 2024).

Keadilan ruang (*spatial justice*) menekankan bahwa norma pembangunan harus mampu menyeimbangkan hak dasar warga dengan kemajuan industri (Afifuddin dkk., 2022). Branding kota yang inklusif melibatkan banyak *co-creators* yang membangun identitas melalui dialog berkelanjutan dan representasi simbolik (Andjanie dan Putro, 2023). Tanpa adanya kesesuaian (*congruence*) antara norma yang dipromosikan (modernitas) dengan norma yang hidup di lapangan (tradisi), ekuitas merek destinasi akan mengalami kerapuhan (Helmig dkk., 2007; Shah dkk., 2020).

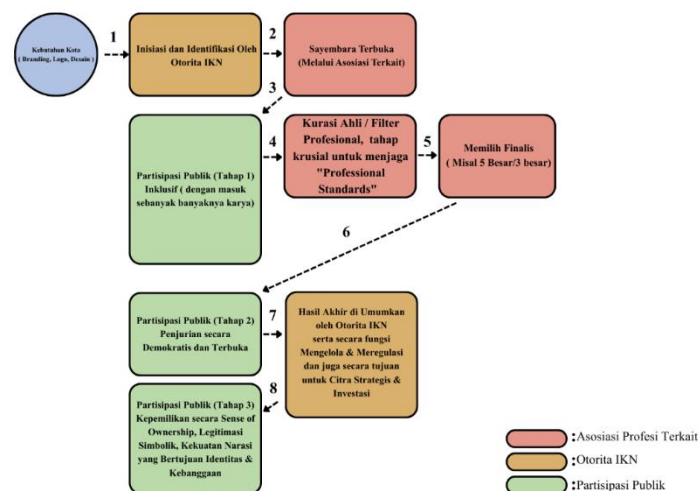
Berdasarkan sintesis teori di atas, peneliti mendefinisikan "Benturan Norma IKN" sebagai kondisi disonansi struktural di mana norma legal-formal pemerintah yang berbasis pada pembuktian administratif bertabrakan secara diametral dengan norma *local wisdom* masyarakat asli yang berbasis pada memori kolektif lisan. Benturan ini melahirkan "kekerasan administratif" (*administrative violence*), yakni situasi di mana prosedur birokrasi yang tampak netral secara sistematis meminggirkan kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap dokumentasi formal (Nurish, 2024; Umasangaji dkk., 2023).

Pengutamaan Norma Legal-Formal: Mekanisme Verifikasi yang Teknokratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui OIKN menerapkan norma kedisiplinan modern sebagai standar utama identitas IKN. Hal ini tervalidasi melalui pengalaman wisatawan yang merasakan suasana bersih, tertib, dan tertata (Informan Wisatawan 3, 2025). Namun, di balik ketertiban tersebut, terdapat prosedur administratif yang sangat ketat dalam pengakuan hak ulayat. Informan Pemerintah 6 (2025) menegaskan: "Terkait pengakuan hak-hak masyarakat lokal, mekanisme yang kami gunakan adalah verifikasi dokumen secara legal-formal... perlu melalui proses validasi dari panitia yang dibentuk Otorita untuk memastikan dasar administrasi yang sah."

The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital

Ahmad Ghazy Dananjaya



Gambar 4. 1 Skema Mekanisme Kolaborasi dalam Standarisasi Identitas IKN Sumber: Dokumen Penelitian (2026)

Kecenderungan pengutamaan norma legal-formal ini didorong oleh status *lex specialis* UU No. 3/2022 yang mengedepankan efisiensi birokrasi (Ahmadi dan Muhjad, 2024). Meskipun efektif untuk akselerasi pembangunan fisik, pendekatan ini berpotensi menempatkan aktor non-negara pada posisi yang kurang diuntungkan dalam relasi kuasa (Ansell dan Gash, 2008). Kelompok akademisi menilai bahwa pelibatan masyarakat asli saat ini masih cenderung bersifat administratif (*tokenism*) daripada substantif, sehingga aspek sosiologis sering kali perlu lebih diselaraskan dengan laju proyek pembangunan (Hudalah, 2023; Aslinda dkk., 2026).

Tantangan Suku Lokal: Beban Administratif di Kawasan Hutan Produksi

Perbedaan norma ini tampak semakin jelas ketika berhadapan dengan realitas sosiologis suku lokal. Banyak wilayah leluhur mereka yang secara administratif dikategorikan sebagai "Hutan Produksi Negara", sehingga klaim adat membutuhkan upaya lebih untuk dapat dibuktikan secara hukum tertulis (Informan Akademisi 7, 2025). Proses pembuktian ini utamanya dibebankan kepada masyarakat adat yang terbiasa dengan pedoman norma non-tertulis. Informan Komunitas 8 (2025) menuturkan: "kami merasa ini adalah beban administratif yang cukup berat bagi masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi."

Keterbatasan dalam memenuhi syarat ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap ruang hidup historisnya (Umasangaji dkk., 2023). Hal ini memunculkan fenomena "hambatan administratif", di mana regulasi yang bersifat prosedural secara tidak langsung dapat membatasi ruang gerak kelompok yang lebih rentan (Nurish, 2024). Disonansi kognitif pun terjadi di antara warga; di satu sisi mereka bangga akan kemajuan nasional, namun di sisi lain mereka merasa kurang dilibatkan secara optimal karena kearifan lokal mereka memerlukan pembuktian tertulis agar dapat diakui secara formal.

Dinamika Visi: Antara "Wajah Kota" dan "Jiwa Kota"

Perbedaan norma ini bermuara pada tantangan efektivitas branding IKN. Secara visual, IKN sukses membangun "Wajah Kota" (City Face) yang modern dan

The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital

Ahmad Ghazy Dananjaya

publik dan menumbuhkan *sense of belonging* yang utuh.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sensitivitas politik agraria di wilayah otorita dan keterbatasan akses terhadap dokumen investasi spesifik yang bersifat rahasia. Disarankan bagi studi lanjutan untuk melakukan riset hukum agraria komparatif internasional terkait pengakuan masyarakat adat di wilayah ibu kota baru. Selain itu, diperlukan studi longitudinal jangka panjang (5-10 tahun) untuk memantau apakah janji inklusivitas IKN benar-benar terwujud secara sosiologis atau justru memperlebar jurang pemisahan kelas antara elit pendatang dengan warga asli yang terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D. A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing On The Value Of A Brand Name*. The Free Press.
- Addas, A. (2024). Optimizing Urban Green Infrastructure Using A Highly Detailed Surface Modeling Approach. *Discover Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/S43621-024-00266-7>
- Addas, I. H. (2024). Daerah Otorita Ibu Kota Negara: Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pemerintahan Daerah*, 7(1), 12744–12756.
- Afandi, S. A., Afandi, M., Erdayani, R., & Afandi, N. H. (2023). Indonesia's Open Government: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Gaspol*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.24815/Gaspol.V4i1.31522>
- Afifuddin, M., Prananta, A. W., & Biroli, A. (2022). Urgensi Pembangunan Ruang Publik Di Ibu Kota Negara Nusantara: Perspektif Habermas & Studi Pustaka. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 1-3. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/1/2>
- Afrilia, L. (2018). City Branding Dan Legitimasi Publik Dalam Pembangunan Kota Baru. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 23-35.
- Afrilia, V., Furqan, A. C., Karim, F., & Meldawati, L. (2025). Analysis Of User Perspectives On Features Of Regional Government Information System (SIPD RI) In Palu. *Balance*, 4(70), 913–927. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/956>
- Ahmadi, & Muhjad, M. H. (2024). Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1202-1215.
- Aji, A. S. S., & Akbardin, M. (2024). Economic Insights Into Workforce Dynamics: Analyzing Labor Supply, Demand, And Compensation. *Advances In Human Resource Management Research*, 2(2), 113–126. <https://doi.org/10.60079/Ahrmr.V2i2.305>
- Alam Taifur, M., & Rahman, A. A. (2025). The Potential For Human Capital Development (HCD) Through Waqf Fund. *Online Jurnal Of Islamic Management And Finance*, 15(1), 96–113. <https://doi.org/10.22452/Ojimf.Vol5no1.7>
- Al-Hagla, K. S., & Al-Sulbi, A. (2025). City Branding And Urban Landscape: Integrating Native Plants And Cultural Heritage For Sustainable Development. *Sustainability*, 17(9). <https://doi.org/10.3390/Su17093935>
- Althalets, F., Et Al. (2025). Lodging Service Performance And Its Influencing Aspects: An Example From National Capital City. *Journal Of Applied Economic Sciences*, 20(3), 363–384. [https://doi.org/10.57017/Jaes.V20.3\(89\).02](https://doi.org/10.57017/Jaes.V20.3(89).02)
- Amru, K., Anjani, R., Plamonia, N., & Pratista, R. D. (2025). Kajian Daya Dukung

The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital

Ahmad Ghazy Dananjaya

- Lingkungan Berbasis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 26(1), 75–81.
- Andjanie, I. F., & Putro, H. P. H. (2023). Creativity And Tourism: Four Creative Cities In Indonesia. *ASEAN Journal On Hospitality And Tourism*, 21(1), 12-25. <https://doi.org/10.31674/Ijrtbt.2021.V07i03.00>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/Jopart/Mum032>
- Ardhiati, Y., & Hasan, A. (2025). Energy-Saving Of The Garuda Palace Building: Shaping The New Capital City Of Nusantara. *Architectural Journal*, 11.
- Aslinda, Syamsuddin, D., & Syatar, A. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Otorita IKN UU No. 3/2022 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Al-Zayn*, 4(2), 5439–5449. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.5003>
- Asmar, A., Adriansyah, A., & Anas, A. M. (2025). A Systematic Literature Review On Msmes Performance: National And International Evidence. *Daengku*, 5(5), 582–598. <https://doi.org/10.35877/454RI.Daengku4302>
- Atmoko, T., Toulec, T., Lhota, S., & Darman, D. (2024). Population Status Of Proboscis Monkeys In Balikpapan Bay And Survival Challenges In Nusantara. *Environmental Monitoring And Assessment*, 196(2), 1–13. <https://doi.org/10.1007/S10661-023-12252-Z>
- Azeem, M., & Salfi, N. A. (2012). Usage Of Nvivo Software For Qualitative Data Analysis. *Academic Research International*, 2(1).
- Basalamah, A. B. R., & Handayani, S. W. (2025). Tanah Ulayat Dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru: Harmonisasi Regulasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. *Al-Zayn*, 3(5), 7147–7154. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2331>
- Bayu, L. K. (2025). Analisis Topic Modelling Ibukota Nusantara Pada Platform X Menggunakan Latent Dirichlet Allocation. *Skripsi Universitas Dinamika*. <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/8025/>
- Benedict, R. (1934). *Patterns Of Culture*. Houghton Mifflin.
- Benne, K. D., & Sheats, P. (1948). Functional Roles Of Group Members. *Journal Of Social Issues*, 4(2), 41–49. <https://doi.org/10.1111/J.1540-4560.1948.Tb01783.X>
- Berawi, M. A. (2022). City Of Tomorrow: The New Capital City Of Indonesia. *International Journal Of Technology*, 13(4), 690–694. <https://doi.org/10.14716/Ijtech.V13i4.6011>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. *Qualitative Research In Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cancela-Outeda, C. (2024). The EU's AI Act: A Framework For Collaborative Governance. *Internet Of Things*, 27, 101291. <https://doi.org/10.1016/J.Iot.2024.101291>
- Cartwright, D., & Zander, A. (Eds.). (1968). *Group Dynamics: Research And Theory (3rd Ed.)*. Harper & Row.
- Decrop, A. (1999). Triangulation In Qualitative Tourism Research. *Tourism Management*, 20(1), 157–161. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00102-2](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00102-2)
- Fitria, D. U. L., & Rochim, F. (2025). Analisis Proses Legislasi UU RI No. 3 Tahun 2022 Tentang IKN Perspektif Masalah Mursalah. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 10(1), 66–91. <https://doi.org/10.53429/Iljs.V10i1.1446>
- Ghalib, H. B., El-Khorazaty, M. T., & Serag, Y. (2021). New Capital Cities As Tools Of Development And Nation-Building. *Ain Shams Engineering*

The Clash of Legal-Formal Norms and Local Wisdom Regarding the Challenge of Recognizing the Living Space of Local Tribes in the Indonesian Capital

Ahmad Ghazy Dananjaya

- Journal*, 12(3), 3405–3409. <https://doi.org/10.1016/J.Asej.2020.11.014>
- Handyastono, B., Et Al. (2025). Flood Hazard Assessment In Pemaluan Village Due To Land Use Change In IKN. *Case Studies In Chemical And Environmental Engineering*, 11, 101211. <https://doi.org/10.1016/J.Cscee.2025.101211>
- Haq, K. M. F., & Suhartono, S. (2024). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *IURIS STUDIA*, 5(3), 772–779.
- Helmig, B., Spickermann, A., & Bauersachs, M. (2007). The Impact Of Brand Congruence On Brand Equity. *Journal Of Service Research*. <https://doi.org/10.1177/1094670507304144>
- Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). Using NVIVO For Data Analysis In Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal Of Education*, 2(2), 181–186. <https://doi.org/10.12816/0002914>
- Hudalah, D. (2024). *Planning Indonesia's New Capital City: Behind Nusantara (1st Ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003529668>
- Ismail, F. B., Et Al. (2024). Exploring The Frontier Of Data Science: Innovations, Challenges, And Future Directions. *Data Science Journal*, 2(2), 163–172.
- Kavaratzis, M. (2004). From City Marketing To City Branding: Towards A Theoretical Framework. *Place Branding*, 1, 58–73. <https://doi.org/10.1057/Palgrave.Pb.5990005>
- Koiwanit, J., & Filimonau, V. (2023). Collaborative Inertia In Tourism Planning: Causes And Consequences. *Tourism Management Perspectives*, 45, 101065. <https://doi.org/10.1016/J.Tmp.2022.101065>
- Lewin, K. (1947). Frontiers In Group Dynamics: Concept, Method And Reality In Social Science. *Human Relations*, 1, 5–41. <https://doi.org/10.1177/001872674700100103>
- Nurish, A. (2024). Konflik Lahan Dan Eksistensi Masyarakat Adat Suku Balik Di IKN. *Islamica*, 18(2), 1–24. <https://doi.org/10.15642/Islamica.2024.18.2.1-24>
- Sinaga, M. P., & Yuningsih, N. Y. (2025). Komunikasi Pemerintahan Otorita IKN Dalam Persiapan Pembangunan. *Jurnal Publicuho*, 8(4), 2524–2550. <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V8i4.967>
- Umasangaji, N. K., Et Al. (2023). Ethnic Emancipation Of Paser Based On Local Resources Use In The Moving Of The Capital City. *Journal Of Sociology*, 7(2), 754–770. <https://doi.org/10.11114/Smc.V11i4.6017>
- Wheeler, A. (2017). *Designing Brand Identity (5th Ed.)*. John Wiley & Sons.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Applications: Design And Methods (6th Ed.)*. SAGE Publications.